

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR /KEP-SJ/2020

RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT JENDERAL
TAHUN 2020-2024



**KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR /KEP-SJ/2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, perlu disusun Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024;
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut Renstra KKP adalah dokumen perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode lima tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 2

- (1) Renstra Sekretariat Jenderal merupakan pedoman bagi setiap unit kerja Eselon II dalam penyusunan matrik kinerja dan pendanaan unit Eselon II.
- (2) Renstra Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan menjadi rencana strategis unit kerja eselon II dan unit kerja mandiri.
- (3) Renstra Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Setjen ini.

Pasal 3

Ruang lingkup Renstra Setjen 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. pendahuluan, yang berisi kondisi umum, potensi dan permasalahan serta lingkungan strategis;
- b. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
- c. arah kebijakan strategi KKP, arah kebijakan strategi Sekretariat Jenderal, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan;
- d. indikator kinerja dan kerangka pendanaan;
- e. penutup.

Pasal 4

- (1) Rincian program/kegiatan, indikator kinerja, target dan alokasi anggaran dari masing-masing kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan dalam Renstra Setjen 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 5

Sekretaris Jenderal melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra dan Renja Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024.

Pasal 6

Program pembangunan kelautan dan perikanan lingkup Sekretariat Jenderal Kelautan dan Perikanan pada tahun anggaran 2020-2024 mengacu pada Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 7

Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal Juli 2020

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

ANTAM NOVAMBAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Pembangunan nasional adalah upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sektor Kelautan dan Perikanan menjadi salah satu sektor prioritas Pemerintah dan diharapkan memberikan kontribusi optimal dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, hal tersebut tertuang dalam Nawacita Presiden Republik Indonesia dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam mendukung pembangunan nasional dan mewujudkan amanah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyusun Rencana Strategis KKP 2020-2024 sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

Renstra Setjen KKP 2020-2024 merupakan penjabaran dari Renstra KKP Tahun 2020-2024. Renstra Setjen KKP 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024.

Sekretariat Jenderal, sebagai unit organisasi di bawah Menteri, bertugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi KKP dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan dalam Renstra KKP 2020-2024. Renstra Setjen KKP 2020-2024 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025; dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024.

Renstra Setjen KKP 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan anggaran pada Sekretariat Jenderal dan dipergunakan sebagai acuan setiap unit kerja eselon II lingkup Sekretariat Jenderal dalam menetapkan dan menerapkan Indikator Kinerja, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran untuk 5 (lima) tahun ke depan

Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja organisasi Sekretariat Jenderal merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh Biro dan Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja tersebut di atas serta seluruh perjanjian kinerja di level Satuan Kerja, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Sekretariat Jenderal Tahun 2019 sebesar 108,88%, dihasilkan dari Nilai Kinerja Perspektif Customer sebesar 36,85%, Perspektif Internal Process sebesar 36,44% dan Perspektif Learn and Growth sebesar 35,59%. Dari 18 Sasaran strategis, terdapat 2 Sasaran strategis yang memiliki nilai dibawah 100%, yaitu: Terwujudnya Birokrasi KKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima (NSS 97,70), dan Terwujudnya ASN SETJEN yang kompeten, profesional dan berintegritas (NSS 90,46). Secara rinci capaian kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2019 berdasarkan uraian capaian kinerja dapat diikuti pada tabel 3.1 berikut :

Tabel
Capaian Kinerja Tahun 2015-2019 Sekretariat Jenderal

Sasaran Strategis		Uraian Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
1	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara KKP yang kompeten, profesional dan berintegritas	1 Indeks profesionalitas ASN (indeks)	-	-	-	-	72,48
2	Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	2 Persentase unit kerja KKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	40	60,92	51,29	81,92	91,14
3	Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	3 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KKP (nilai)	70,51	78,74	78,74	78,95	BB (78,60)
		4 Nilai AKIP KKP (nilai)	-	87,75	84,59	82,45	A (81,64)
4	Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel	5 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP (%)	-	-	-	-	94,62
		6 Opini atas LK KKP (opini)	WTP	WTP	TMP	TMP	WTP
5	Terwujudnya kerja sama yang implementatif dan opini publik yang positif terhadap program dan kebijakan KKP	7 Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama (%)	40	46	126,4	117,14	109,48
		8 Rasio jumlah pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan tentang KKP (%)	-	-	-	-	0,2
6	Terwujudnya Pelayanan Kesekretariatan yang prima bagi mitra KKP	9 Indeks pelayanan kesekretariatan yang prima bagi mitra KKP (indeks)	-	-	-	3,8	4,16
7	Tersedianya kebijakan pembangunan lingkup SETJEN yang partisipatif	10 Indeks efektivitas kebijakan pemerintah lingkup Setjen (indeks)	6	7,67	8,11	8,2	8,27
8	Terselenggaranya penempatan SDM KKP berbasis kompetensi	11 Persentase unit kerja yang mengimplementasikan penempatan SDM KKP berbasis kompetensi dibanding total unit kerja yang ada di KKP (%)	100	94	90	83	76,02
9	Tersedianya data statistik informasi KP yang valid, handal dan mudah diakses	12 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data (%)	-	-	-	47,25	65,89
10	Terselenggaranya RB KKP yang optimal	13 Persentase program dan kegiatan RB yang dilaksanakan dibanding jumlah program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai <i>road map</i> RB per tahun (%)	90	97,92	90,95	97,89	92,59

Sasaran Strategis		Uraian Indikator Kinerja		2015	2016	2017	2018	2019
		14	Nilai Kepuasan pelayanan kerumahtangaan (nilai)	-	-	75,16	81,05	A (82,44)
		15	Persentase Paket yang Dilakukan Tender Dibandingkan Total Paket yang Diusulkan (%)	-	-	-	72	99
11	Terwujudnya Laporan Keuangan yang Akuntabel	16	Persentase kesesuaian penyusunan dan ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan (%)	100	100	80	100	80
12	Terseleenggaranya publikasi dan pelayanan komunikasi dengan media dan lembaga yang optimal	17	Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan KKP melalui media dan lembaga stakeholder lainnya (%)	115	95,5	97,32	96,87	176,88
13	Terintegrasinya sistem informasi KKP	18	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indeks)	-	-	-	-	3,57 (Sangat Baik)
14	Terlaksananya pengembangan dan pembinaan kerja sama bidang KP	19	Jumlah dokumen kerja sama yang disepakati (dokumen)	40	77	93	133	112
15	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara SETJEN yang kompeten, profesional dan berintegritas	20	Indeks profesionalitas ASN lingkup SETJEN (indeks)	-	-	-	-	69,54
16	Tersedianya manajemen pengetahuan SETJEN yang handal dan mudah diakses	21	Persentase unit kerja lingkup SETJEN yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	40	51,11	54,81	88,27	96,78
17	Terwujudnya birokrasi SETJEN yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	22	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi SETJEN (nilai)	82,10	86,24	87,10	89,78	A (98,77)
		23	Nilai AKIP Setjen (nilai)	-	86,24	87,10	84,82	83,35
		24	Level Maturitas SPI Setjen (Level)	-	-	2	3	3
		25	Unit kerja berpredikat menuju WBK lingkup Setjen (unit)	-	-	-	-	0
		26	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Setjen (%)	-	-	-	-	82
18	Terkelolanya anggaran pembangunan SETJEN secara efisien dan akuntabel	27	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup SETJEN (%)	-	-	-	-	93,58

Sasaran Strategis		Uraian Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	28	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK SETJEN dibandingkan Realisasi Anggaran SETJEN TA.2018 (%)	-	-	-	0,62	0,01

Selama tahun 2015-2019, Sekretariat Jenderal telah meraih berbagai penghargaan dan prestasi dengan rincian sebagai berikut :

a. SAKIP KKP dari Kemen PAN RB

Dengan diterapkannya manajemen kinerja di KKP berbasis BSC, sejak tahun 2013 KKP mendapatkan penilaian A dari Kementerian PAN dan RB untuk pelaksanaan SAKIP dan capaian yang sangat baik ini telah mampu dipertahankan oleh KKP s.d tahun 2018, bahkan KKP merupakan satu-satunya Kementerian teknis yang mendapatkan predikat A.

Melalui implementasi SAKIP, paradigma kinerja pemerintah telah mengalami perubahan, tidak lagi sekedar pelaksanaan program kegiatan yang dianggarkan, tetapi melakukan kegiatan dan program dengan cara yang paling efektif dan efisien. Kemudian anggaran juga dapat dipastikan mendukung pencapaian tujuan pembangunan dalam skala prioritas. Penghematan terhadap penggunaan anggaran juga bisa ditekan melalui penghapusan pro-gram kegiatan karena tidak mendukung capaian atau sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, orientasi kinerja saat ini mengalami perubahan besar, bekerja tidak hanya membuat laporan atau hanya sekedar untuk menyerap anggaran. Selain memberikan penghargaan atas implementasi SAKIP, Kementerian PAN RB juga memberikan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan. Rekomendasi tersebut ditujukan agar setiap instansi pemerintah mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran agar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan demi kesejahteraan masyarakat.

b. Anugerah Parahita Ekapraya dari Kementerian PPA

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) adalah sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). Anugerah Parahita Ekapraya berarti suatu penghargaan terhadap prakarsa dan prestasi yang dicapai dan menunjukkan kondisi dan kesejahteraan orang lain dalam kaitannya dengan pencapaian kesejahteraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. Tiga Kategori Penerima APE yaitu Tingkat Pratama (Pemula), Tingkat Madya (Pengembang), dan Tingkat Utama (Peletakan dasar dan Keberlanjutan). Sejak dilakukan penilaian setiap tahun oleh tim dari KPPA, untuk pertama kalinya KKP mendapatkan APE pada tahun 2013 memperoleh predikat Tingkat Pratama dari Presiden RI yang diberikan pada Puncak Peringatan Hari Ibu Tahun 2013, yang kemudian predikat tersebut berhasil ditingkatkan menjadi Tingkat Madya pada tahun 2014 dan menjadi Tingkat Utama pada tahun 2016 dan pada tahun 2019, KKP penghargaan APE untuk Kategori Mentor yang diberikan oleh Wakil Presiden RI pada tanggal 19 Desember 2018 di Istana Wakil Presiden.

c. Subroto Award 2018 kategori Gedung Hemat Energi dan Kategori Manajemen Energi

Penghargaan Subroto adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Kementerian ESDM kepada para stakeholder yang memiliki prestasi luar biasa dalam memajukan sektor ESDM. Tahun 2018 merupakan tahun kedua peyelenggaraan Penghargaan Subroto.

Penghargaan Subroto terdiri dari enam bidang penghargaan, yang terdiri dari Wartawan Energi, Keselamatan Ketenagalistrikan, Efisiensi Energi, Keselamatan Minyak dan Gas Bumi, Pengelolaan, Keselamatan, Lingkungan Dan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara, serta bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lindungan Lingkungan Panas Bumi. Gedung Mina Bahari IV Kementerian Kelautan dan Perikanan RI meraih predikat PEMENANG I untuk kategori Bangunan Gedung Hemat Energi subkategori gedung baru. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

didampingi Wakil Menteri ESDM menganugerahkan Penghargaan Subroto 2018 kepada para stakeholder yang turut berperan aktif membangun sektor energi dan mineral pada tanggal 28 September 2018.

d. 36th ASEAN Ministers on Energy Award 2018

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menyabet penghargaan dalam ajang bergengsi ASEAN Energy Awards 2018. Penghargaan tersebut adalah 1st Runner-Up untuk kategori Green Large Building bagi Gedung Mirna Bahari IV. Penghargaan internasional ini diberikan pada rangkaian pelaksanaan 36th ASEAN Minister on Energy Meeting (AMEM) di, Singapura pada hari selasa, 29 Oktober 2018. ASEAN *Energy Awards* secara rutin diselenggarakan setiap tahun sejak tahun 2000. Anugerah ini bertujuan untuk memberi apresiasi terhadap *best practices* dan meningkatkan kesadaran publik terhadap pemanfaatan dan pengembangan energi baru, terbarukan dan konservasi energi. Proses seleksi dan penentuan pemenang sangat kompetitif dari ratusan kandidat yang diusulkan seluruh negara anggota ASEAN. Prestasi dalam ajang bergengsi ini menunjukkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan memenuhi standar lingkungan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kegiatan perkantoran yang ramah lingkungan. Selain itu, prestasi ini juga merefleksikan bahwa penggiat energi terbarukan terus melakukan berbagai inovasi, dan bahwa instansi-instansi besar untuk meningkatkan kualitas manajemen pengelolannya secara kontinyu.

e. Kearsipan K/L dari ANRI

Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia menyerahkan secara langsung Hasil Laporan Pengawasan Kearsipan Tahun 2018 kepada 34 Kementrian/Lembaga yang di selenggarakan oleh Direktorat Pusat Akreditasi Kearsipan di Jakarta. Diharapkan melalui kegiatan pengawasan di bidang kearsipan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai bentuk menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 di bidang kearsipan karena ANRI sebagai Lembaga pembina di bidang kearsipan mengapresiasi dan memberikan perhatian kepada masing-masing Kementerian/Lembaga terhadap pengelolaan arsip yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah di bidang kearsipan. Pada kesempatan yang sama juga diumumkan hasil laporan pengawasan kearsipan terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu berhasil meraih peringkat ke-7 atau masuk kelompok 10 terbaik. Dengan di umumkannya hasil laporan pengawasan kearsipan terhadap 34 kementrian/Lembaga tersebut di harapkan dapat menjadi contoh bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap peningkatan kinerja pengelolaan arsip pada setiap kegiatan administrasi pemerintahan dan bisa menjadi bukti akuntabilitas kinerja suatu Kementerian/ Lembaga dalam pengelolaan arsip pemerintah agar lebih efektif dan efisien sebagai wujud Good Government yang bersih dan transparan dalam setiap kegiatan administrasi pemerintah. Beberapa aspek yang diaudit di bidang kearsipan meliputi kebijakan kearsipan program kearsipan, pengelolaan arsip, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM) kearsipan, serta prasarana dan sarana kearsipan.

f. Penghargaan KASN untuk manajemen talenta dan seleksi terbuka

Sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja dan kepatuhan Instansi Pemerintah dalam kualitas tata kelola seleksi terbuka JPT dan inovasi penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memberikan "Anugerah KASN 2018" yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta tanggal 23 Oktober 2018. Untuk memastikan pemberian "Anugerah KASN 2018" berjalan secara obyektif, professional dan independen maka KASN bekerjasama dengan pihak eksternal untuk membentuk Tim Panel. Unsur eksternal merepresentasikan ketokohan, kredibilitas, kontribusi dan perannya dalam mewujudkan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik sesuai bidang keahlian dan profesinya. Terdapat 2 (dua) Kategori "ANUGERAH KASN 2018" yaitu kategori utama dengan tema kepatuhan dan kualitas tata kelola seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi dan kategori khusus yaitu inovasi dan promosi penguatan penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara. Kementerian Kelautan berhasil menjadi penerima ANUGERAH KASN 2018 kategori utama. Melalui penghargaan ini diharapkan agar kinerja dan tata kelola manajemen ASN di KKP dapat menjadi lebih baik.

- g. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) diberikan oleh Komisi Informasi Pusat Penghargaan Peringkat 5 Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP) Kategori Badan Publik Kementerian, 21 Desember 2017. Predikat Kepatuhan Standar Layanan Publik KKP berada pada Zona Hijau dengan Nilai 91,13 dari Ombudsman, 5 Desember 2017.
- h. Anugerah Media Humas 2018 Kategori Medsos tingkat Kementerian/Lembaga UMN/PTN Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, mendapatkan penghargaan Terbaik Pertama Kategori Media Sosial dalam Anugerah Media Humas (AMH 2018) yang diselenggarakan oleh Kemenkominfo pada hari Selasa, 4 Desember 2018. Acara ini diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) di bawah Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dengan harapan kinerja kehumasan instansi pemerintah semakin membaik.

Secara administratif Sekretariat Jenderal juga membina Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) dengan komoditas kelautan dan perikanan dimana selain mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan bank dan non bank sejak November 2017 juga mendapatkan pembiayaan dari dana bergulir Badan Layanan Umum (BLU). Kinerja pengelolaannya bergulir LPMUKP tahun 2019 cenderung positif. Sampai dengan tahun 2019, jumlah persetujuan pinjaman melalui dana bergulir bidang kelautan dan perikanan sebesar Rp.409,38 miliar dan tersalurkan kepada lima kategori sektor usaha bidang kelautan dan perikanan yaitu penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan, usaha garam rakyat dan usaha masyarakat pesisir lainnya (kedai pesisir, wisata bahari). Dana bergulir yang disalurkan melalui LPMUKP tersebut telah disalurkan di 34 provinsi yang mencakup 199 kab/kota. Lima Kab/kota dengan tingkat penyaluran terbesar yaitu di Lombok Tengah, Indramayu, Cilacap, Kota Tarakan dan Bima. Jumlah pemanfaat dana bergulir LPMUKP s.d tahun 2019 mencapai 13.037 orang

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Potensi

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat penting dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk itu perlu dilakukan pemetaan potensi yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal, untuk memanfaatkan secara efektif dan efisien dari peluang dan kesempatan yang ada. Potensi yang dimiliki oleh sekretariat antara lain:

- a) Komitmen kuat dari pimpinan dan seluruh aparatur Sekretariat Jenderal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b) Sumber daya manusia baik struktural maupun fungsional yang handal dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal;
- c) Sarana dan prasarana aparatur dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran yang memadai;
- d) Peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan kegiatan di KKP;
- e) Sistem kerja berbasis elektronik dan teknologi informasi yang dapat meningkatkan kualitas dan produktifitas kerja;
- f) Kualitas laporan keuangan yang handal dengan capaian opini WTP;
- g) Perencanaan program, anggaran dan pengelolaan kinerja yang baik dan berkualitas;
- h) Pelaksanaan RB dalam peningkatan Birokrasi yang efektif, bersih efisien dan akuntabel
- i) Informasi publik yang transparan dan kehumasan yang komunikatif dan adaptif.

2. Permasalahan

Untuk mengoptimalkan kinerja Sekretariat Jenderal masih terdapat permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan upaya penyelesaian di Tahun 2020-2024 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Belum seluruh pegawai dapat mengikuti program peningkatan kapasitas melalui pelatihan sesuai dengan ketentuan dalam memenuhi nilai Indeks Profesionalisme ASN (IP ASN) serta melengkapi ketentuan manajemen talenta pengembangan SDM aparatur;
2. Belum seluruh pegawai mendapatkan luasan ruang kerja yang ideal karena keterbatasan pemilikan gedung perkantoran;

3. Masih diperlukan penataan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal disesuaikan dengan analisa beban kerja dan kebutuhan organisasi yang bersifat dinamis;
4. Pelaksanaan pemerintahan berbasis digital masih perlu penguatan sarana dan prasarana SDM untuk mencapai indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik);
5. Pengumpulan dan pengolahan data statistik masih menghadapi tantangan akan ketersediaan dan kinerja para penyuluh/enumerator serta penyediaan sistem aplikasi yang handal.

C. LINGKUNGAN STRATEGIS

Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Jenderal akan menjadi penggerak utama dalam mengimplementasikan amanat kepada setiap K/L untuk melakukan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang meliputi pelaksanaan 8 area perubahan yaitu program manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas layanan publik. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengedepankan kolaborasi dan keterlibatan banyak pihak.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI

Sekretariat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP diarahkan untuk mendukung dan mengoptimalkan segenap potensi yang ada untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan yakni "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong".

Dalam rangka mewujudkan visi KKP, pada tahun 2020-2024 Sekretariat Jenderal menetapkan visi sebagai berikut:

Penggerak Utama Tatakelola Pemerintahan yang Baik menuju Terwujudnya Visi KKP

Sekretariat Jenderal sebagai motor penggerak utama dalam pelaksanaan dan pembinaan sistem tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KKP, seperti pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan dukungan manajemen di lingkungan KKP.

B. MISI

Dalam rangka mewujudkan visi Sekretariat Jenderal tersebut, maka misi yang ditetapkan adalah:

1. Peningkatan profesionalisme dalam pelayanan dukungan manajemen;
2. Penguatan budaya organisasi di lingkungan KKP;

C. TUJUAN

Tujuan beserta indikatornya dalam rangka menjabarkan dan mewujudkan misi Sekretariat Jenderal KKP adalah:

1. Meningkatnya efektifitas koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP dengan indikator : Indeks Profesional ASN, Indeks sistem merit, Indeks pengelolaan keuangan, Indeks pengelolaan aset, Indeks perencanaan, Indeks kearsipan, Nilai SPBE KKP;
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi di lingkungan KKP, dengan indikator Meningkatnya nilai kinerja RB KKP, Nilai SAKIP KKP, dan nilai PMPRB Setjen.

D. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Sekretariat Jenderal sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mencapai tujuan Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024 sasaran strategis adalah "Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Jenderal" dengan indikator kinerja:

1. Nilai PMPRB Sekretariat Jenderal (nilai)
2. Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Sekretariat Jenderal (kumulatif) (unit)
3. Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup Sekretariat Jenderal (%)
4. Opini atas Laporan Keuangan KKP (opini)

5. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Sekretariat Jenderal (indeks)
6. Nilai PM SAKIP Sekretariat Jenderal (nilai)
7. Nilai Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal (level)
8. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Sekretariat Jenderal (%)
9. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat Jenderal (%)
10. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik lingkup Sekretariat Jenderal (unit kerja)
11. Nilai SAKIP KKP (nilai)
12. Indeks Sistem Merit (indeks)
13. Indeks pengelolaan keuangan (indeks)
14. Indeks pengelolaan aset (indeks)
15. Indeks perencanaan (indeks)
16. Indeks kearsipan (indeks)
17. Indeks kematangan UKPBJ (indeks)
18. Nilai SPBE KKP (nilai)
19. Nilai IKPA Lingkup Setjen (nilai)
20. Nilai NKA Lingkup Setjen (nilai)

Disamping Sasaran Strategis diatas mengingat Sekretariat Jenderal mengkoordinasikan dukungan pelayanan BLU-LPMUKP, terdapat Sasaran Strategis “PNBP BLU Sektor KP Meningkatkan “ dengan indikator Persentase Pencapaian Target PNBP Badan Layanan Umum (%) dan realisasi penyaluran dana bergulir BLU-LPMUKP (Rp miliar).

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan arahan Presiden yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan yang tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Arah dan kebijakan KKP yang akan ditempuh dalam tahun 2020-2024, terdiri dari:

1. memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan;
2. mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat;
3. membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan;
4. pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait; dan
5. penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan lima arah kebijakan tersebut, KKP menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di pusat dan daerah. Disamping itu, KKP melaksanakan seluruh kebijakan pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024, yakni gender, pembangunan berkelanjutan, modal sosial, dan transformasi digital.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKRETARIAT JENDERAL

Berdasarkan peran Sekretariat Jenderal yang dimandatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 07/PERMEN-KP/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan untuk melaksanakan Arah Kebijakan dan strategi KKP Tahun 2020-2024 terutama yang terkait dengan Sekretariat Jenderal yaitu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, maka arah kebijakan dan strategi Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan aparatur sipil negara KKP yang kompeten, profesional, dan berkepribadian, dengan strategi: (i) Peningkatan kualitas dan disiplin aparatur; (ii) Penempatan Sumber Daya Manusia KKP Berbasis kompetensi; (iii) Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian KKP.
2. Membangun manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses, dengan strategi: (i) Pengembangan manajemen pengetahuan; (ii) Penyediaan data statistik dan informasi yang handal; (iii) Penerapan sistem informasi KKP yang terintegrasi.
3. Mewujudkan birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan akuntabel, dengan strategi: (i) Peningkatan nilai kinerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal; (ii) Penyiapan peraturan perundangan yang harmonis; (iii) Pembangunan sistem perencanaan yang berorientasi pada hasil dan monitoring evaluasi pengelolaan kinerja yang terstruktur;
4. Menerapkan pengelolaan anggaran pembangunan yang efisien dan akuntabel, dengan strategi: (i) Peningkatan kinerja anggaran Sekretariat Jenderal; (ii) Peningkatan tingkat kepatuhan SAP lingkup Sekretariat Jenderal; (iii) Ketepatan waktu penyampaian LK.
5. Mewujudkan kebijakan pembangunan kelautan perikanan yang partisipatif, dengan strategi: (i) Pelayanan terpadu satu pintu yang berorientasi pada pelayanan prima; (ii) Peningkatan PNBK

fungsional; (iii) Publikasi program dan kegiatan KKP pada Media serta sosialisasi pada lembaga/ stakeholder.

6. Mewujudkan kerja sama internasional dan antarlembaga yang implementatif, dengan strategi: (i) Peningkatan jumlah dokumen kerja sama dan perjanjian internasional bidang kelautan perikanan yang disepakati; (ii) Pelaksanaan Kerja Sama Teknik bidang kelautan perikanan; (iii) Penyediaan pedoman delegasi republik indonesia.

C. KERANGKA REGULASI

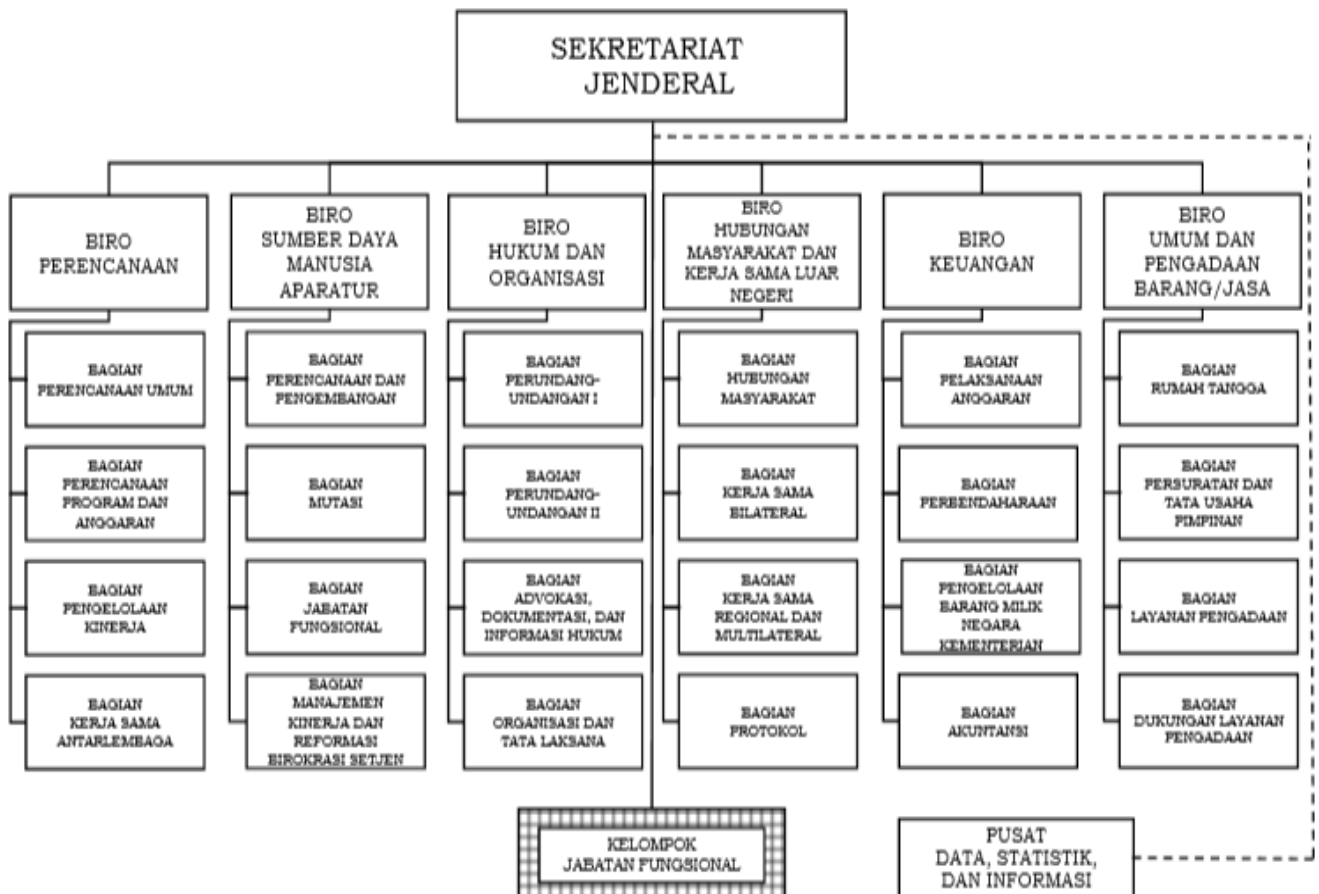
Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi KKP dan Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi KKP. Penyusunan peraturan perundang-undangan di KKP dilaksanakan berdasarkan program penyusunan peraturan perundang-undangan tahunan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Secara terinci rencana kerangka regulasi Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Sekretariat Jenderal adalah unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Selain itu, terdapat pula unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal, yaitu unit organisasi yang bersifat pendukung, seperti Pusat Data, Statistik, dan Informasi.

Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal



Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Jenderal memiliki tugas yaitu menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi kegiatan KKP;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran KKP;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi KKP;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Tugas dan fungsi eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut:

a) Biro Perencanaan

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan kebijakan umum, program dan anggaran, dan pengelolaan kinerja organisasi, serta kerja sama antarlembaga di bidang kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan koordinasi, penyusunan, dan penyerasian perencanaan kebijakan umum dan strategis serta perencanaan kawasan terpadu di bidang kelautan dan perikanan;
- 2) penyiapan koordinasi, penyusunan, dan penyerasian rencana kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta analisis, formulasi, dan perencanaan pinjaman dan hibah luar negeri, dan dana transfer di bidang kelautan dan perikanan;
- 3) penyiapan koordinasi, penyusunan, dan penyerasian perencanaan, pengukuran, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi, serta bahan pimpinan;
- 4) penyiapan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kerja sama di bidang kelautan dan perikanan dengan kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga nonpemerintah; dan
- 5) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

b) Biro Sumber Daya Manusia Aparatur

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengelolaan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, dan pembinaan sumber daya manusia aparatur;
- 2) penyiapan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan promosi, alih tugas jabatan, kepangkatan, pemberhentian, dan pemensiunan pegawai;
- 3) penyiapan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan pengkajian, analisis, pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan administrasi angka kredit, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan jabatan fungsional;
- 4) penyiapan koordinasi dan pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP);
- 5) penyiapan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan pengelolaan sistem, data informasi dan arsip kepegawaian;
- 6) penyiapan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Sekretariat Jenderal; dan
- 7) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro

c) Biro Keuangan

Biro Keuangan mempunyai tugas melakukan pembinaan tata kelola, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja, koordinasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dan pembinaan badan layanan umum, tata laksana dan transformasi keuangan, kepatuhan pejabat perbendaharaan, penyelenggaraan sistem akuntansi dan pelaporan, pengendalian internal dan kepatuhan atas laporan keuangan, dan penyelesaian kerugian negara dan koordinasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) koordinasi, pembinaan tata kelola, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja, penerimaan negara bukan pajak, dan pembinaan badan layanan umum;
- 2) koordinasi dan pembinaan tata laksana dan transformasi keuangan serta kepatuhan pejabat perbendaharaan;
- 3) koordinasi dan pembinaan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan, pengendalian internal dan kepatuhan atas laporan keuangan, serta penyelesaian kerugian negara;
- 4) koordinasi dan pembinaan pengelolaan BMN; dan
- 5) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta pengelolaan kinerja biro.

d) Biro Hukum dan Organisasi

Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, advokasi, rancangan perjanjian, dokumentasi, dan informasi hukum, pembinaan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi KKP.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan koordinasi dan fasilitasi penelaahan, penyusunan, dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan, serta evaluasi dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, penguatan daya saing, serta riset dan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- 2) penyiapan koordinasi dan fasilitasi penelaahan, penyusunan, dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan, serta evaluasi dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan di bidang kesekretariatan, pengawasan internal, pengelolaan ruang laut, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta karantina ikan dan pengendalian mutu;
- 3) penyiapan koordinasi dan fasilitasi konsultasi hukum, pendapat hukum, pendampingan, penyelesaian perkara hukum, dan diseminasi hukum, penyusunan rancangan perjanjian, serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- 4) penyiapan koordinasi dan fasilitasi, analisis, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana KKP, serta reformasi birokrasi di lingkungan KKP; dan
- 5) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta pengelolaan kinerja biro

e) Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa

Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan rumah tangga, tata usaha pimpinan, persuratan, kearsipan, dan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas kantor pusat, serta layanan pengadaan barang/jasa dan dukungan layanan pengadaan barang/jasa KKP.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, dan bimbingan teknis urusan rumah tangga kantor pusat, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pusat, dan urusan angkutan dan keamanan dalam;
- 2) penyiapan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan Menteri, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, Staf Khusus Menteri, dan Penasihat Menteri, serta persandian
- 3) penyiapan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan teknis layanan dan dukungan layanan pengadaan barang/jasa, serta bimbingan teknis pengadaan barang/jasa;
- 4) koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, dan bimbingan teknis urusan persuratan dan kearsipan,

- penggandaan, ekspedisi, dan pencetakan;
- 5) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, serta pengelolaan kinerja biro dan gaji pegawai Setjen; dan
 - 6) kegiatan penunjang pelaksanaan tugas kantor pusat

f) Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan, analisis, pengembangan program, dan pembinaan hubungan masyarakat, kerja sama internasional di bidang kelautan dan perikanan dan keprotokolan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan;
- 2) penyiapan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan;
- 3) penyiapan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kerja sama regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan;
- 4) penyiapan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan keprotokolan bagi Menteri; dan
- 5) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta pengelolaan kinerja biro.

g) Pusat Data, Statistik, dan Informasi

Pusat Data, Statistik, dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyediaan data dan statistik, pengembangan aplikasi dan sistem informasi, serta infrastruktur teknologi informasi di bidang kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Data, Statistik, dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan koordinasi penyusunan program dan rencana pengelolaan dan penyediaan data dan statistik kelautan dan perikanan;
- 2) penyiapan penyusunan rencana dan program perancangan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi sistem informasi;
- 3) penyiapan penyusunan rencana dan program pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi;
- 4) bimbingan teknis pengelolaan dan penyediaan data dan statistik, pengembangan aplikasi dan sistem informasi, serta infrastruktur teknologi informasi di bidang kelautan dan perikanan;
- 5) pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer di lingkungan KKP; dan
- 6) pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga pusat.

h) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)

Selain 6 Biro dan 1 Pusat, Sekretariat Jenderal juga secara administrasi membawahi LPMUKP yang ditetapkan sebagai Satker Badan Layanan Umum (BLU) melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 710/KMK.05/2016. Sejalan dengan hal tersebut, pada APBN 2017, LPMUKP mendapatkan alokasi investasi pemerintah dalam bentuk Dana Kelolaan BLU.

Menindaklanjuti penetapan LPMUKP sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU, Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (OTK LPMUKP). Penetapan OTK LPMUKP ini dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tugas utama LPMUKP yaitu melakukan pengelolaan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sektor Kelautan dan Perikanan (UMKM-KP). Pelayanan yang dilakukan oleh LPMUKP diantaranya penggunaan dana bergulir melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM-KP), Usaha mikro kecil menengah, Bank/Lembaga Keuangan bukan Bank, langsung pelaku usaha KP dan Layanan pendampingan LPMUKP.

Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Jenderal akan terus melakukan penyempurnaan penataan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal. Penataan organisasi ini sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi. Penataan kelembagaan Sekretariat Jenderal akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang terus berkembang, serta arahan Presiden terkait dengan transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional.

BAB IV

INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Target jangka menengah sampai dengan tahun 2024 untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja ditetapkan dalam 2 sasaran strategis dan 21 Indikator Kinerja.

Tabel
Target Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Sekretariat Jenderal	1	Nilai PMPRB Sekretariat Jenderal (nilai)	30	31	32	33	34
		2	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Sekretariat Jenderal (kumulatif) (unit)	1	1	2	2	2
		3	Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup Sekretariat Jenderal (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1
		4	Opini atas Laporan Keuangan KKP (opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		5	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Sekretariat Jenderal (indeks)	72	73	74	75	76
		6	Nilai PM SAKIP Sekretariat Jenderal (nilai)	83	83,15	83,25	83,5	83,75
		7	Nilai Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal (level)	3	3	3	3	3
		8	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Sekretariat Jenderal (%)	82	84	86	88	90
		9	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat Jenderal (%)	60	65	70	75	80
		10	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik lingkup Sekretariat Jenderal (unit kerja)	1	1	1	1	1
		11	Nilai SAKIP KKP (nilai)	A (82,5)	A (83)	A (83,5)	A (84)	A (85)
		12	Indeks Sistem Merit (indeks)	0,65	0,7	0,8	0,83	0,85
		13	Indeks pengelolaan keuangan (indeks)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		14	Indeks pengelolaan aset (indeks)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		15	Indeks perencanaan (indeks)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		16	Indeks kematangan UKPBJ (indeks)	7	9	9	9	9
		17	Indeks kearsipan (Indeks)	83	83,5	84	84,5	85
		18	Nilai SPBE KKP (nilai)	3,6	3,7	3,8	3,9	4
		19	Nilai IKPA Lingkup Setjen (nilai)	88	89	89	90	90
		20	Nilai NKA Lingkup Setjen (nilai)	85	86	87	88	89
2	PNBP BLU Sektor KP Meningkatkan	21	Persentase Pencapaian Target PNBP Badan Layanan Umum (%)	95	95	96	96	97
		22	Realisasi penyaluran dana bergulir BLU LPUMKP (Rp Miliar)	725	1.000	1.000	1.000	1.000

Sekretariat Jenderal melaksanakan program kerja yang mendukung pelaksanaan program

pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP.

Tujuan program adalah meningkatkan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan dengan sasaran meningkatnya kesesuaian pelaksanaan dukungan manajerial.

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Indikator Kinerja Kegiatan dalam struktur manajemen kinerja di KKP merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit kerja Sekretariat Jenderal.

B. KERANGKA PENDANAAN

Upaya untuk mencapai tujuan Sekretariat Jenderal dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan diperlukan dukungan sumber daya keuangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Kerangka indikasi pendanaan Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024 adalah sebesar Rp 2,39 triliun yang digunakan untuk pengelolaan sumber daya manusia aparatur, pengelolaan keuangan KKP, pengelolaan perencanaan, kinerja dan kerja sama antar lembaga, pengelolaan pengadministrasian dan pengadaan barang jasa, pengelolaan kerja sama masyarakat dan kerja sama luar negeri serta pengelolaan data statistik dan informasi kelautan dan perikanan. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

Disamping itu terdapat baseline alokasi anggaran penggunaan PNBPN BLU-LPMUKP sebesar Rp 369,6 miliar tahun 2020-2024.

Indikator kinerja dan indikasi pendanaan Sekretariat Jenderal 2020-2024 disusun dengan mengacu kepada arah pembangunan nasional yang tertuang dalam Renstra KKP 2020-2024, dan belum memperhitungkan dampak pandemi global Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020.

PENUTUP

Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024 disusun dan merupakan dokumen perencanaan lima tahunan bagi rencana kerja tahunan di lingkup Sekretariat Jenderal.

Pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024 akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Kerjasama dari seluruh jajaran Sekretariat Jenderal dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

ANTAM NOVAMBAR

KERANGKA PENDANAAN SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2020-2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)// SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Dukungan Manajemen							431,00	457,70	479,01	501,36	524,32	2.393,39
	<i>Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan KKP dan Sekretariat Jenderal</i>											
	a. Nilai PMPRB Sekretariat Jenderal (nilai)	30	31	32	33	34						
	b. Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Sekretariat Jenderal (kumulatif) (unit)	1	1	2	2	2						
	c. Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup Sekretariat Jenderal (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	d. Opini atas Laporan Keuangan KKP (opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
	e. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Sekretariat Jenderal (indeks)	72	73	74	75	76						
	f. Nilai PM SAKIP Sekretariat Jenderal (nilai)	83	83,15	83,25	83,5	83,75						
	g. Nilai Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal (level)	3	3	3	3	3						
	h. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Sekretariat Jenderal (%)	82	84	86	88	90						
	i. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat Jenderal (%)	60	65	70	75	80						
	j. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik lingkup Sekretariat Jenderal (unit kerja)	1	1	1	1	1						
	k. Nilai SAKIP KKP	A (82,5)	A (83)	A (83,5)	A (84)	A (85)						
	l. Indeks Sistem Merit (indeks)	0,65	0,7	0,8	0,83	0,85						
	m. Indeks pengelolaan keuangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
	n. Indeks pengelolaan aset	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
	o. Indeks perencanaan (indeks)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
	p. Indeks kematangan UKPBJ	7	9	9	9	9						
	q. Indeks kearsipan (Indeks)	83	83,5	84	84,5	85						
	r. Nilai SPBE KKP (nilai)	3,6	3,7	3,8	3,9	4						
	s. Nilai IKPA Lingkup Setjen (nilai)	88	89	89	90	90						
	t. Nilai NKA Lingkup Setjen (nilai)	85	86	87	88	89						
Penyiapan Produk Hukum dan Penataan Organisasi KKP							15,5	17,5	20,5	23,5	26,5	103,5

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)// SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Penyiapan Produk Hukum dan Penataan Organisasi KKP											
	a. Komponen Nilai Reformasi Birokrasi KKP yang menjadi tanggungjawab Biro Hukum dan Organisasi (nilai)	9,8	9,94	10,08	10,22	10,36						
	b. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Biro Hukum dan Organisasi (indeks)	72	73	74	75	76						
	Layanan Hukum (layanan)						12,40	13,60	15,40	16,80	18,20	
	a. Jumlah peraturan perundang-undangan bidang Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang tersusun	30	32	34	36	38	4,10	4,50	5,10	5,60	6,10	
	b. Jumlah peraturan perundang-undangan bidang Kesekretariatan, Pengawasan Internal, Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang tersusun	52	54	56	58	60	4,20	4,50	5,10	5,60	6,10	
	c. Jumlah penanganan masalah hukum di bidang kelautan dan perikanan	56	50	50	44	44	4,10	4,60	5,20	5,60	6,00	
	Layanan Manajemen Organisasi (layanan)						1,80	2,20	2,80	3,60	4,40	
	Jumlah pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan KKP	11	11	11	11	11	1,80	2,20	2,80	3,60	4,40	
	Layanan Reformasi Birokrasi (layanan)						1,30	1,70	2,30	3,10	3,90	
	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP	4	4	4	4	4	1,30	1,70	2,30	3,10	3,90	
	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur						14,8	16,8	19,8	22,8	25,8	100
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur											
	a. Komponen Nilai Reformasi Birokrasi KKP yang menjadi tanggungjawab Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (nilai)	7,7	7,81	7,92	8,03	8,14						
	b. Indeks Sistem Merit (indeks)	0,65	0,7	0,8	0,83	0,85						
	c. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (indeks)	72	73	74	75	76						
	d. Nilai PMPRB Sekretariat Jenderal (nilai)	30	31	32	33	34						
	Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia (layanan)						14,80	16,80	19,80	22,80	25,80	
	a. Jumlah layanan Perencanaan, Pengembangan, dan Pembinaan Pegawai (dokumen)	12	12	12	12	12	3,5	3,95	4,65	5,35	6,05	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)// SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	b. Jumlah layanan Pengangkatan, Kepangkatan, Pemberhentian Pensiun, dan Mutasi (dokumen)	10	10	10	10	10	3,5	3,95	4,65	5,35	6,05	
	c. Jumlah layanan Pengembangan, Pengelolaan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional (dokumen)	5	5	5	5	5	3,5	3,95	4,65	5,35	6,05	
	d. Jumlah Layanan Manajemen Kinerja Individu, Informasi, dan Ketatausahaan (dokumen)	18	18	18	18	18	4,3	4,95	5,85	6,75	7,65	
Pengelolaan Keuangan KKP							21	23	26	29	32	131,00
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Pengelolaan Keuangan KKP											
	a. Komponen Nilai Reformasi Birokrasi KKP yang menjadi tanggungjawab Biro Keuangan (nilai)	3,5	3,55	3,6	3,65	3,7						
	b. Indeks pengelolaan keuangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
	c. Indeks pengelolaan aset	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
	d. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Biro Keuangan (indeks)	72	73	74	75	76						
Layanan Manajemen Keuangan (layanan)							21	23	26	29	32	
	a. Tingkat Kepatuhan Terhadap SPI (%)	100	100	100	100	100	5,15	5,70	6,50	7,10		
	b. Tingkat Ketaatan Terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (%)	100	100	100	100	100	5,30	5,80	6,50	7,30	8,00	
	c. Kecukupan Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan KKP (%)	100	100	100	100	100	5,29	5,68	6,50	7,30	8,00	
	d. Kecukupan Informasi Pelaksanaan Anggaran KKP (%)	100	100	100	100	100	5,30	5,80	6,50	7,30	8,00	
Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Kerja sama Antarlembaga							48,3	50,3	53,3	56,3	59,3	267,50
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Kerja sama Antarlembaga											
	a. Komponen Nilai Reformasi Birokrasi KKP yang menjadi tanggungjawab Biro Perencanaan (nilai)	13,48	13,67	13,86	14,05	14,25						
	b. Indeks Perencanaan (indeks)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
	c. Nilai SAKIP KKP (nilai)	82,04	82,5	83	83,5	84						
	d. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Biro Perencanaan (indeks)	72	73	74	75	76						
Layanan Perencanaan (layanan)							48,3	50,3	53,3	56,3	59,3	
	Terlaksananya Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Kerja sama Antarlembaga (%)	100	100	100	100	100	48,3	50,3	53,3	56,3	59,3	
Pengelolaan Administrasi dan Pengadaan Barang/Jasa							252,6	269,3	275,6	283	291,9	1372,40
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Pengelolaan Administrasi dan Pengadaan Barang/Jasa											
	a. Komponen Nilai Reformasi Birokrasi KKP yang menjadi tanggungjawab Biro	1,4	1,42	1,44	1,46	1,48						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)// SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (nilai)											
	b. Indeks kematangan UKPBJ	7	9	9	9	9						
	c. Indeks Kearsipan (Indeks)	83	83,5	84	84,5	85						
	d. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (indeks)	72	73	74	75	76						
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (layanan)						19,60	24,60	25,60	27,10	29,10	
	Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Internal Lingkup Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (%)	100	100	100	100	100	19,60	24,60	25,60	27,10	29,10	
	Layanan Umum (layanan)						42,90	47,90	48,90	50,40	52,40	
	a. Persentase pencapaian standar pelayanan persuratan dan ketatausahaan pimpinan sesuai SOP (%)	100	100	100	100	100	10,73	11,98	12,23	12,60	13,10	
	b. Persentase pencapaian standar pelayanan dalam pengelolaan rumah tangga kantor pusat KKP dan ketatausahaan biro sesuai SOP (%)	86	87	88	89	90	10,63	11,98	12,13	12,60	13,00	
	c. Persentase pencapaian standar pelayanan pengadaan sesuai SOP (%)	65	67	70	72	75	10,73	11,98	12,23	12,60	13,10	
	d. Persentase pencapaian standar pemenuhan dukungan layanan pengadaan sesuai SOP (%)	65	67	70	72	75	10,73	11,98	12,23	12,60	13,10	
	Layanan Perkantoran (layanan)						190,10	196,80	201,10	205,50	210,40	
	Jumlah pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, dan layanan perkantoran lingkup Sekretariat Jenderal (bulan)	12	12	12	12	12	190,10	196,80	210,10	205,50	210,40	
	Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri						40,3	42,3	45,3	48,3	51,3	227,50
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri											
	a. Komponen Nilai Reformasi Birokrasi KKP yang menjadi tanggungjawab Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (nilai)	3,5	3,55	3,6	3,65	3,7						
	b. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (indeks)	72	73	74	75	76						
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi (layanan)						14,30	14,80	15,80	16,80	17,80	79,5
	Rasio jumlah pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan tentang KKP (%)	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	14,30	14,80	15,80	16,80	17,80	
	Layanan Protokol (layanan)						18,50	19,00	20,00	21,00	22,00	100,5
	Terselenggaranya pelayanan kepada pimpinan (layanan)	1	1	1	1	1	18,50	19,00	20,00	21,00	22,00	
	Layanan Kerjasama Internasional (layanan)						7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	47,5

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)// SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	a. Persentase dokumen kerja sama internasional yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama (%)	90	90	90	90	90	6,20	7,00	7,80	8,70	9,50	
	b. Kerja sama Selatan-selatan dan tringular bidang kelautan dan perikanan (paket)	2	2	2	2	2	1,30	1,50	1,70	1,80	2,00	8,30
Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP							54,00	56,00	59,01	61,96	64,02	294,99
	<i>Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Pengelolaan Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan</i>											
	a. Komponen Nilai Reformasi Birokrasi KKP yang menjadi tanggung jawab Pusat Data, Statistik, dan Informasi (nilai)	4,38	4,44	4,5	4,56	4,63						
	b. Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KKP (nilai)	3,6	3,7	3,8	3,9	4						
	c. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi (indeks)	72	73	74	75	76						
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (layanan)						7,50	8,00	8,50	9,40	9,50	
	a. Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Internal Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi (%)	100	100	100	100	100	7,50	8,00	8,50	9,40	9,50	
	Layanan Data dan Informasi (layanan)						46,50	48,00	50,51	52,56	54,52	
	a. Tingkat kepatuhan pengolahan data kelautan dan perikanan (%)	75	80	85	90	90	9,30	9,60	10,10	10,60	11,10	
	b. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90	9,30	9,60	10,11	10,66	11,12	
	c. Nilai Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (nilai)	3,4	3,6	3,8	4	4,2	9,30	9,60	10,10	10,10	11,10	
	d. Indeks Keamanan Informasi Berbasis Informasi dan Teknologi (nilai)	300	305	310	315	320	9,30	9,60	10,10	10,60	10,10	
	e. Persentase program kerja reformasi birokrasi bidang tata laksana (nilai)	4	4	4	4	4	9,30	9,60	10,10	10,60	11,10	
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							69,10	71,10	73,70	76,50	79,20	369,60
Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan							69,10	71,10	73,70	76,50	79,20	369,60
	Layanan pengelolaan penyaluran modal usaha (layanan)											
	a. Tersedianya Layanan Penyaluran Modal Usaha KP (bulan)	12	12	12	12	12	23,20	23,80	24,70	26,40	26,60	
	b. Realisasi UMKM kelautan dan perikanan penerima modal usaha (KUKP)	35.985	9.820	9.264	8.740	8.245	23,10	23,80	24,70	25,50	26,50	
	c. Rasio piutang bermasalah terhadap <i>outstanding</i> dana bergulir (%)	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	22,80	23,50	24,30	24,60	26,10	

KERANGKA REGULASI SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2020-2024

No.	Judul Rancangan Peraturan/Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan	Eselon II Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
1.	Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi	Biro Perencanaan	Unit Kerja Eselon I KKP	setiap tahun

No.	Judul Rancangan Peraturan/Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan	Eselon II Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
	dan Ditugaskan Kepada Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan			
2.	Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2021	Biro Perencanaan	Unit Kerja Eselon I KKP	setiap tahun
3.	Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024	Setjen	Biro Perencanaan	2020
4.	Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renja) Tahun 2021	Biro Perencanaan	Unit Kerja Eselon I KKP	setiap tahun
5.	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMENKP/2017 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja di Lingkungan KKP	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur	Unit Kerja Eselon I KKP	Dua tahun sekali
6.	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMENKP/2016 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan KKP	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur	Unit Kerja Eselon I KKP	Sesuai kebutuhan
7.	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMENKP/2018 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur	Unit Kerja Eselon I KKP	setiap tahun
8.	Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Biro Hukum dan Organisasi	Unit Kerja Eselon I KKP	Sesuai kebutuhan
9.	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Biro Hukum dan Organisasi	Unit Kerja Eselon I KKP	setiap tahun
10.	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan	Biro Hukum dan Organisasi	Unit Kerja Eselon I KKP	Sesuai kebutuhan
11.	Koordinator Substansi dan Subkoordinator Substansi	Biro Hukum dan Organisasi	Unit Kerja Eselon I KKP	Setiap tahun
12.	Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Biro Hukum dan Organisasi	Unit Kerja Eselon I KKP	Sesuai kebutuhan
13.	Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Biro Hukum dan Organisasi	Unit Kerja Eselon I KKP	Sesuai kebutuhan
14.	Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Biro Hukum dan Organisasi	Unit Kerja Eselon I KKP	Sesuai kebutuhan
15.	Analisis Jabatan Analisis Beban Kerja	Biro Hukum dan Organisasi	Unit Kerja Eselon I KKP	Setiap tahun
16.	Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Biro Hukum dan Organisasi	Unit Kerja Eselon I KKP	Sesuai kebutuhan
17.	Koordinator Substansi dan Subkoordinator Substansi UPT	Biro Hukum dan Organisasi	Unit Kerja Eselon I KKP	Setiap tahun
18.	Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024	Biro Hukum dan Organisasi	Unit Kerja Eselon I KKP	2020
19.	Peta Bisnis Proses Kementerian Kelautan dan Perikanan	Biro Hukum dan Organisasi	Unit Kerja Eselon I KKP	2020
20.	Peta Jabatan di Lingkungan KKP Tahun 2020-2024	Biro Hukum dan Organisasi	Unit Kerja Eselon I KKP	Sesuai kebutuhan

No.	Judul Rancangan Peraturan/Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan	Eselon II Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
21.	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMENKP/2016 tentang Pedoman Umum dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan	Biro Keuangan	Unit Kerja Eselon I KKP	Setiap tahun
22.	Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Biro Keuangan	Unit Kerja Eselon I KKP	Sesuai kebutuhan
23.	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMENKP/2017 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan	Pusat Data Statistik dan Informasi	Unit Kerja Eselon I KKP	2020

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.
ANTAM NOVAMBAR